



Akademisi Tak Setuju ASN Kerja di Kantor

Khawatir Tingkatkan Kasus Virus Corona

YOGYA, TRIBUN - Pakar kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM, Agus Heruanto Hadna, menyatakan tidak setuju dengan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk *work from office* (WFO).

Ia menganggap, dalam kondisi kasus Covid-19 masih terus meningkat, ASN lebih baik menerapkan WFH dengan sistem 50:50 seperti sebelumnya.

"Kalau saya termasuk yang masih khawatir, di banyak kasus kan mening-

kat lagi. Di DIY juga masih mengkhawatirkan peningkatannya. Dengan kasus seperti ini saya termasuk belum setuju kalau semua harus WFO. Saya setuju yang dulu, WFH," ujarnya saat dihubungi Tribun Jogja, Rabu (15/7) lalu.

Hadna, sapaan akrab Agus Heruanto Hadna, mengungkapkan hal ini demi mengantisipasi transmisi lokal yang juga banyak terjadi. Terlebih, kata dia, di DIY orang-orang berpindah dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota

lain. "Di kabupaten DIY ini orang ke sana ke mari," ungkapnya.

Tim ahli dalam Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM ini

● ke halaman 15

Khawatir Tingkatkan Kasus

• Sambungan Hal 9

menambahkan, ASN yang melaksanakan WFO dinilai riskan menjadi sarana penyebaran Covid-19 karena banyak kantor-kantor yang menggunakan air conditioner (AC). Selain itu, ukuran ruang terkadang tidak memadai untuk menerapkan jaga jarak.

"Sangat riskan menurut saya ASN kita itu bekerja full di kantor. Dalam satu ruangan yang tidak seberapa. Dalam banyak riset sudah dikatakan kalau ruang tertutup, full AC, sangat riskan. Kantor kita itu banyak yang pakai AC," paparnya.

Ia pun menyarankan agar ASN tetap menerapkan sistem sif 50:50. Namun, harus ditinjau dengan kondisi normal sebelum pandemi. "Kalau WFH 50:50 harus bisa membagi kerja secara efektif, jobdesk normal yang dulu harus diubah. Harus disesuaikan dengan kondisi pandemi. Itu saya lihat belum terjadi," tuturnya.

Menurut pakar di bidang pemerintahan lokal itu, jobdesk di masa pandemi harus disiapkan oleh pemerintah dengan detail. Yakni menyasar kepada setiap individu dengan target yang konkrit per harinya.

"Birokrat kita itu banyak yang kayak piano, dipencet baru bunyi. Mereka bingung di rumah itu kerja apa. Ini harus dibuatkan oleh pemerintah. Jobdesk itu harus per orang. Targetnya hari ini apa," terangnya.

Di sisi lain, lanjut Hadna, ialah permasalahan teknologi informasi. Menurutnya, dengan sistem WFH belum tentu semua ASN mempunyai jaringan internet atau

pulsa yang mencukupi. "Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah," tandasnya.

Namun demikian, jika Pemda DIY tetap menerapkan sistem WFO secara penuh, ia memberi catatan agar protokol kesehatan benar-benar dijalankan. "Protokol kesehatan harus betul-betul kuat. Sejak orang baru datang, kemudian masuk ke kantor, duduk di kantor. Harus dipikirkan bagaimana ini. Bisa enggak protokol kesehatan yang ditetapkan secara internasional itu diterapkan dalam birokrasi," pungkasnya.

Perwal

Menghadapi tatanan normal baru, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta mulai bekerja di kantor. Hal itu termaktub dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam Perwal tersebut, seluruh pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*). Peraturan tersebut telah ditetapkan pada 1 Juli 2020 lalu.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, mengatakan protokol pencegahan Covid-19 juga diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pihaknya telah memperbanyak tempat cuci tangan di kompleks Balai Kota Yogyakarta.

Tak hanya itu Kompleks Balai Kota Yogyakarta juga menjadi kawasan wajib masker, artinya seluruh ASN juga diwajibkan memakai masker. Kompleks Balai Kota Yogyakarta juga saat ini dilengkapi dengan QR Code.

"Seluruh pegawai bekerja di kantor. Tentu protokol

kesehatan menjadi hal yang wajib, wajib pakai masker, cuci tangan dan penggunaan *hand sanitizer*. Termasuk alur keluar masuk dinas juga disiapkan, sudah ada tandanya," katanya, Rabu (15/7).

Menurut dia, ASN Pemkot Yogyakarta juga perlu adaptasi dengan tatanan baru. Sebab ASN Pemkot Yogyakarta merupakan insan pembangunan di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta, tak hanya itu, ASN juga diharapkan menjadi panutan di masyarakat.

Di tengah pandemi ini, Haryadi menilai justru menjadi momentum untuk membangun optimisme baru. Jika sebelumnya sebagian ASN melakukan pekerjaan di rumah, saat ini ASN bisa kembali bekerja di kantor.

"Kemarini WFH (*work from home*) pegawai dituntut untuk tetap produktif, saat ini bisa lebih produktif lagi. Pelayanan kepada masyarakat juga harus ditingkatkan, harus lebih banyak inovasi. Jangan sampai pada masa tatanan baru justru menurun," ujarnya.

Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di wilayah DIY saat ini telah menjalankan *work from office* (WFO) atau bekerja dari kantor, setelah sebelumnya Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menerapkan sistem *shift* 50:50.

Perubahan itu menyusul diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja ASN di Lingkungan Pemda DIY dan Pemda Kabupaten/Kota Se-DIY Dalam Tatanan Normal Baru per 29 Juni 2020.

Di dalamnya disebutkan aturan yang memperbolehkan ASN melakukan *work from home* (WFH) atau bekerja dari rumah hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. (*uti/maw*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005